

BAB III

PEMBAHASAN

Pada hari Minggu 23 September 2018, Persib Bandung kembali dipertemukan dengan Persija Jakarta pada lanjutan kompetisi Liga 1. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada pukul 15.30 WIB tersebut diwarnai dengan tindakan kerusuhan suporter kedua belah pihak; Bobotoh pendukung Persib Bandung dengan The Jak Mania pendukung Persija Jakarta. Kerusuhan tersebut terjadi pada pukul 13.00 WIB di luar stadion dan memakan korban salah satu pendukung Persija Jakarta, yakni Haringga Sirila.

Haringga tewas setelah menjadi korban pengeroyokan dan pemukulan oleh beberapa oknum Bobotoh, pendukung Persib Bandung. Haringga Sirila seorang pendukung Persija Jakarta pada hari itu akan menyaksikan pertandingan antara klub kesayangannya di kandang Persib Bandung. Namun nahasnya, Haringga menjadi salah satu korban *sweeping* dari Bobotoh yang kemudian berbuntut pengeroyokan oleh oknum Bobotoh di area parkir stadion. Peristiwa tersebut menjadi ramai tidak hanya di area stadion saja tetapi juga di ranah dunia maya setelah video pengeroyokan tersebut diunggah ke media sosial *Youtube*.

Seperti yang sudah jamak diketahui, rivalitas yang tinggi antara Bobotoh dengan The Jak Mania sudah terjadi sejak lama. Sebelum Haringga, tercatat sudah ada lima suporter yang menjadi korban tewas pada saat pertandingan antara Persib Bandung vs Persija Jakarta digelar. Tak jarang apabila kedua belah pihak baik

Bobotoh maupun The Jak Mania bertemu secara langsung pada saat pertandingan digelar.

Selain itu, Haringga menjadi korban tewas kekerasan suporter sepak bola ketujuh pada satu tahun terakhir ini. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi ramai diberitakan media nasional pada kurun waktu mulai dari tanggal 26 September 2018. Beberapa media nasional tersebut, seperti Jawa Pos, Kompas, dan Republika tak jarang menyoroti bagaimana penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tanah air. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga menjadi sorotan beberapa media nasional tersebut. Pasalnya pada tanggal 26 September 2018, PSSI menggulirkan wacana terakut dengan penghentian Liga 1 dengan durasi waktu yang belum ditentukan. Wacana penundaan kompetisi Liga 1 tersebut mendapat respon publik yang beragam. Tentu hal ini menjadi perhatian, karena dari sekian respon yang hadir, tak jarang banyak yang menuding PSSI dianggap lalai dalam menyelenggarakan kompetisi pertandingan sepak bola di tanah air. Tidak teraturnya penyelenggaraan tersebut berbuntut banyak kerusuhan sepak bola yang melibatkan suporter sepak bola.

Mulai dari kasus meninggalnya Haringga Sirila hingga wacana penghentian sementara Liga 1 tanpa batasan waktu ini telah banyak menyedot perhatian publik yang penuh. Hal ini terlihat pada bagaimana media massa nasional meletakkan berita-berita mereka. Jawa Pos pada tanggal 26 September 2018 meletakkan kasus ini menjadi *headline* koran dengan judul “Penundaan Liga tanpa Batas Waktu”. Sama namun berbeda, di tanggal yang sama pula, Harian Kompas menerbitkan Tajuk Rencana dengan judul “Menanti Ketegasan PSSI”.

Melihat respon media yang hadir menanggapi kasus tersebut, peneliti akan membahas bagaimana media-media nasional tersebut menghadirkan wacana dari berita-berita pada kasus meninggalnya Haringga Sirila ini dengan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Teknik analisis ini akan melihat bagaimana kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual yang hadir dalam wacana pemberitaan media-media tersebut.

A. Wacana Teks Media

1. Wacana Jawa Pos: PSSI Harus Turun Tangan

1.1. Perombakan PSSI dan Penundaan Liga

Pada tema ‘Perombakan PSSI dan Penundaan Liga’ ini, Jawa Pos mengidentikkan diri dengan klub Liga 1 dan suporter sepak bola yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan PSSI. Hal tersebut dilakukan dengan memuat narasumber dari pihak klub dan suporter lebih banyak daripada pihak PSSI.

Pada tanggal 26 September 2018, Jawa Pos mengangkat berita mengenai kasus meninggalnya Haringga Sirila sebagai *headline* koran dengan judul berita “Penundaan Liga tanpa Batas Waktu”. Dengan anak judul “PSSI Bentuk Tim Investigasi” dan “Big Match Arema vs Persebaya Terimbis”. Di bagian atas koran tersebut, Jawa Pos meletakkan foto Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi.

Pada berita tersebut, topik yang diangkat oleh Jawa Pos yakni berkenaan dengan keputusan PSSI untuk menunda Liga 1 tanpa batasan waktu yang ditentukan. Pada tataran skematik, berita Jawa Pos ini disusun dengan skema, pertama PSSI memutuskan untuk menunda Liga 1 dan membentuk tim investigasi yang akan bekerja untuk memberikan rekomendasi terkait dengan sanksi atau hukuman atas tindakan pengeroyokan tersebut. Kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi meminta penundaan liga berlangsung selama dua minggu. Ketiga, penundaan liga tersebut berimbas kepada laga pertandingan antara Arema melawan Persebaya.

Pada tataran sintaksis, Jawa Pos menggunakan kata ganti “Gubernur Sumatera Utara” untuk menunjuk Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi. Penggunaan kata ganti tersebut merujuk kepada Edy Rahmayadi yang memiliki *double* jabatan, yakni Ketum PSSI dan juga menjabat sebagai Gubernur aktif di Sumatera Utara. Kata ganti ini hanya digunakan sekali oleh Jawa Pos di dalam berita, selebihnya Jawa Pos menggunakan kata ganti “dia” untuk merujuk kepada Edy Rahmayadi. Dengan menggunakan kata ganti tersebut, Jawa Pos turut menyoroti *double* jabatan yang dimiliki oleh Edy Rahmayadi. Aih-alih fokus membenahi PSSI, Edy malah juga menjabat sebagai Gubernur aktif di Sumatera Utara. Dari berita ini, Jawa Pos

seakan membangun wacana bahwa keputusan PSSI tersebut seperti akan menuai pro dan kontra karena belum adanya tenggat waktu yang diberikan.

27 September 2018, Jawa Pos menerbitkan berita dengan judul “Tertunda, Sulit Menjaga Performa”. Pada tataran tematik, Jawa Pos masih mengambil tema yang berkaitan dengan penundaan liga. Jawa Pos mengambil topik mengenai kerugian klub atas penundaan Liga 1. Jawa Pos mengambil sudut pandang dari beberapa klub yang dirugikan. Pada tataran semantik, pada paragraf awal. Jawa Pos menuliskan pranggapan mengenai kondisi Bali United yang terancam menurun akibat dari penundaan liga.

JAKARTA – Bali United sebenarnya sedang dalam kondisi bagus-bagusnya. Hingga pekan ke-23 Liga 1, mereka berhasil merangsek ke peringkat ketiga klasemen sementara. Serdadu Tridatu – julukan Bali United – juga tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Namun, penundaan kompetisi tanpa batas waktu bisa menghambat performa yang sedang menanjak tersebut. (Jawa Pos, 27 September 2018)

Pranggapan yang muncul dari paragraf di atas, yakni penundaan liga tanpa batas waktu dapat mempengaruhi performa dari klub Bali United, apalagi Bali United pada saat itu berada dalam posisi keempat klasemen Liga 1. Kosakata yang digunakan oleh Jawa Pos untuk menggambarkan keadaan yang mungkin terjadi pada klub atas penundaan liga ini, yakni “kacau balau”. Jawa Pos juga menulis metafora “mengucurkan dana” dalam merujuk pendanaan bagi klub dari para sponsor. Hal tersebut membangun wacana, bahwa klub memang butuh sponsor dalam pendanaan kegiatan mereka, dan dengan penundaan ini, klub jelas-jelas dirugikan. Pada akhir paragraf, pranggapan tersebut didukung oleh pernyataan dari pelatih Bali United Widodo Cahyono Putro yang dimuat oleh Jawa Pos.

Selain kualitas tim menurun, dia mengkhawatirkan sponsor mulai enggan mengucurkan dana kepada klub. Melihat sepak bola Indonesia yang tidak kondusif, kredibilitas klub pasti menurun di mata sponsor. “Kalau tidak ada sponsor, bisa dibayangkan bagaimana sepak bola Indonesia yang akan tertinggal jauh dari negara lain,” jelasnya. (Jawa Pos, 27 September 2018)

Pada tataran semantik yang lainnya, yakni koherensi antarkalimat dan antarparagraf semakin membangun wacana

bahwa keputusan PSSI tersebut merugikan banyak pihak. Pada paragraf pertama dan kedua, Jawa Pos menyebutkan, bahwa semangat dan *peak performance* para pemain akan kembali menurun. Pada paragraf ketiga, Jawa Pos menyebutkan, bahwa pelatih Bali United menghormati keputusan PSSI tersebut guna instropeksi dan efek jera. Paragraf keempat dan kelima, Jawa Pos kembali memuat pernyataan klub Bali United dan ditambah dengan kekecewaan Manajer Bhayangkara FC, AKBP Sumardji di paragraf lima. Selain itu, Jawa Pos juga menggunakan kata ganti “para petinggi federasi” dalam merujuk PSSI.

Masih dengan tema yang sama, yakni penundaan kompetisi Liga 1, pada tanggal 28 September 2018 Jawa Pos kembali menerbitkan berita dengan judul “Harapan kepada Komdis PSSI Baru”. Dalam berita tersebut, PSSI seolah semakin terlihat menjadi objek pemberitaan Jawa Pos. Hal ini terlihat dari judul berita yang bersifat non-agentif, yakni penghilangan subjek di dalam kalimat, sehingga hanya ada objek di dalam kalimat tersebut. Di dalam judul “Harapan kepada Komdis PSSI Baru”, PSSI ialah yang menjadi sorotan dan objek pemberitaan Jawa Pos. Penulisan judul yang non-agentif tersebut seakan Jawa Pos “melindungi” si subjek – yang mengharapkan adanya perbaikan dalam tubuh Komdis PSSI.

Pada tataran semantik, paragraf awal Jawa Pos menggunakan nominalisasi “salah satu” di dalam kalimat “Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menjadi salah satu yang paling disorot publik sepak bola tanah air”. Nominalisasi ini membangun wacana bahwa tidak hanya satu aspek saja yang menjadi sorotan publik selama ini. Selain itu, Jawa Pos juga menggunakan kosakata “merombak” dalam beberapa paragraf berita tersebut, alih-alih menggunakan kata “perbaikan”.

Masih dalam tataran semantik, wacana Jawa Pos juga dibangun melalui koherensi antarkalimat dan antarpagraf di dalam beritanya. Pada paragraf pertama dan kedua, Jawa Pos menyebut penundaan liga merupakan momentum yang pas untuk perbaikan PSSI dan klub sangat mendukung hal tersebut. Paragraf ketiga, Jawa Pos memuat pernyataan Joko Driyono mengenai perlunya pergantian Komdis PSSI ini. Keempat, Jawa Pos menyebut, selain komdis, komisi banding dan komisi wasit juga perlu dirombak. Kelima, Jawa Pos memuat pernyataan Manajer Madura United yang menyebut, bahwa PSSI merupakan lembaga yang luar biasa dan membutuhkan tenaga ahli di dalamnya. Keenam, Jawa Pos menuliskan kekecewaan Manajer Madura United, Haruna Soemitro mengenai kinerja PSSI dahulu yang dirasa berafiliasi dengan salah satu klub.

1.2. Seruan Perdamaian Antarsuporter

Tema ‘Seruan Perdamaian Antarsuporter’ semakin mengidentikkan Jawa Pos dengan klub dan suporter. Masih pada tanggal 28 September 2018, Jawa Pos juga menerbitkan berita dengan judul “Sepakat Hilangkan Nyanyian Dibunuh Saja”. Berbeda dengan berita di atas, berita ini mengambil topik mengenai seruan perdamaian antarsuporter di Indonesia. Pada tataran semantik, Jawa Pos menggunakan nominalisasi “banyak dirugikan” dalam paragraf awal untuk merujuk kerugian yang dirasakan oleh Persebaya Surabaya.

Terutama dari beberapa pentolan suporter yang selama ini juga berharap tidak ada lagi rivalitas yang berujung hilangnya nyawa dalam sepak bola Indonesia. Salah satunya suporter Persebaya Surabaya alias Bonek yang juga banyak dirugikan oleh fanatisme negatif tersebut.

(Jawa Pos, 28 September 2018)

Dari paragraf di atas, nominalisasi tersebut juga memunculkan pranggapan yang dibangun oleh Jawa Pos, bahwa Persebaya juga merasa banyak dirugikan atas fanatisme negatif tersebut, apalagi oleh rivalitas antarsuporter yang tak jarang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, kosakata

yang digunakan oleh Jawa Pos juga menggunakan metafora untuk menggambarkan sikap PSSI yang dianggap merugikan klub. Jawa Pos menggunakan kata “tebang pilih” untuk merujuk pada keputusan PSSI dalam memberikan sanksi untuk suporter dan klub.

Artinya, untuk menghilangkan kebencian antarsuporter, kampanye damai harus dilakukan banyak pihak. Tidak hanya Viking atau The Jak, PSSI dan pemerintah juga harus turun tangan. “Harus benar-benar serius kalau mau ini jadi momen perubahan.” (Jawa Pos, 28 September 2018)

Dari paragraf di atas, Jawa Pos memuat pranggapan bahwa PSSI belum sepenuhnya serius dalam menangani kasus-kasus yang ada dalam sepak bola Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan penggunaan kosakata “harus turun tangan” yang digunakan oleh Jawa Pos pada pemberitaannya tersebut.

Topik mengenai seruan perdamaian antarsuporter ini sebelumnya juga telah diangkat oleh Jawa Pos di pemberitaan pada tanggal 27 September 2018. Pada berita yang berjudul “Laga Amal untuk Haringga”, Jawa Pos menyusun berita dengan skema, pertama, Arema FC yang harus menunda

pertemuannya dengan Persebaya Surabaya karena imbas dari penundaan liga tersebut. Kedua, rencana Arema FC yang akan menggelar laga amal bersama Madura United. Ketiga, Madura United menyambut baik pertandingan amal tersebut dan menganggap hal tersebut bisa menjadi ajang latihan bagi tim selama masa “libur” pertandingan.

Seruan perdamaian yang didengungkan oleh Jawa Pos semakin jelas ditunjukkan dengan pemilihan kata yang digunakan oleh Jawa Pos. Jawa Pos menggunakan kata “waktu lowong” dan “libur” untuk merujuk penundaan kompetisi Liga 1 alih-alih menggunakan kosakata yang lebih bersifat negatif. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan kata “libur” oleh Jawa Pos dapat diasumsikan menjadi waktu untuk latihan tim yang akan bertanding.

Dalam tataran sintaksis, Jawa Pos cenderung meletakkan kalimat aktif di setiap pendapat yang disampaikan. Terdapat dua pendapat narasumber yang dimuat dalam pemberitaan ini, yakni pendapat dari pihak *general manager* Arema FC dan pihak Manajer Madura United. Keduanya, disampaikan dalam bentuk kalimat pasif yang kemudian didukung dengan kalimat aktif di kalimat selanjutnya.

Topik ini masih digunakan oleh Jawa Pos dalam pemberitaannya pada tanggal 30 September 2018. Pada berita yang berjudul “Dengungkan Ikrar Rivalitas tanpa Membunuh”, skema yang disusun oleh Jawa Pos, yakni pertama,

Haruna menambahkan, dari sambutan laga amal terlihat antusiasme mayarakat yang luar biasa. Karena itu, para perwakilan klub Liga 1 sepakat agar kekerasan suporter paada laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta menjadi tragedi yang terakhir.(Jawa Pos, 30 September 2018)

Pada tataran semantik, Jawa Pos menggunakan nominalisasi “para perwakilan klub” untuk merujuk pada jumlah klub yang ikut dalam acara pengucapan ikrar perdamaian antarsuporter. Pada tataran sintaksis, pendapat disampaikan dalam bentuk kalimat aktif di setiap pendapat yang dimuat.

2. Wacana Republika: Semua Pihak Harus Bertanggung Jawab

Dalam kasus meninggalnya Haringga Sirila ini, Republika mengidentikkan diri dengan masyarakat penikmat sepak bola. Hal ini terlihat dengan bagaimana Republika memuat narasumber-narasumber di setiap pemberitaan dan tataran skematik pemberitaan mereka. Dalam memberitakan kasus ini,

Republika mencoba untuk menyinggung hampir seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus ini, yang menarik dalam setiap pemberitaannya ini pula, wacana berbeda yang coba dihadirkan oleh Republika terkait dengan Persib Bandung dan Bobotoh.

Pada tanggal 26 September 2018 Republika menerbitkan sebuah berita dengan judul “Suporter Harus Dibina”. Pada tataran tematik, berita tersebut mengambil topik yang berkaitan dengan perlu adanya evaluasi kepada seluruh pihak. Pada tataran skematik, Republika menyusun berita tersebut dengan skema; pertama, adanya desakan untuk melakukan pembinaan kepada para suporter. Kedua, dalam menyelesaikan kasus ini, PSSI harus ikut turun tangan, termasuk dengan BOPI, klub, dan aparat. Ketiga, peristiwa pengeroyokan ini merupakan buntut minimnya profesionalitas penyelenggara sepak bola Indonesia.

Pada tataran semantik, Republika menuliskan pranggapannya dengan menggunakan kata “harus” dalam pernyataan-pernyataan yang mereka muat. Seperti pada paragraf awal, Republika menulis, “Suporter harus diberikan pendidikan mengenai sportivitas demi meminimalisasi tindakan negatif”. Dengan menggunakan diksi “harus”, Republika telah menuliskan pranggapannya bahwa tingkah laku suporter sepak bola di Indonesia merupakan penyebab yang banyak

mengakibatkan kerusuhan di persepak bolaan tanah air dan maka dari itu perlu adanya pendidikan sportivitas bagi mereka.

JAKARTA – Sejumlah pihak mendesak setiap klub sepak bola melakukan pembinaan kepada suporter. Suporter harus diberikan pendidikan mengenai sportivitas demi meminimalisasi tindakan negatif. (Republika, 26 September 2018)

Tidak hanya itu, pranggapan dengan menggunakan kata “harus” juga ditulis oleh Republika dalam salah satu paragrafnya yang memuat pernyataan dari narasumber yang sama, yakni “PSSI juga harus turun tangan. BOPI, klub, aparat, harus turun tangan. Saya berharap suporter Persija tidak melakukan aksi balasan.”

Pada tataran skematik, Republika menyusun skema pemberitaan dengan pertama, banyak pihak yang mendesak klub untuk melakukan pembinaan suporter, hal ini didukung dengan pernyataan Anggota DPR Komisi X, Nizar Zahro. Kedua, peristiwa meninggalnya Haringga ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki penyelenggaraan kompetisi sepak bola tanah air, salah satunya dengan cara PSSI, BOPI, klub, dan aparat harus turun tangan bersama-sama. Hal ini juga

didukung dengan pernyataan politikus PKS, Suhud Aliyuddin. Ketiga, Republika menulis bahwa rivalitas antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung ini sudah terbilang lama, mestinya aparat keamanan bisa mencegah hal tersebut terjadi.

Pengambilan narasumber oleh Republika dalam pemberitaan di atas memperlihatkan, bahwa di dalam kasus ini, tidak hanya wacana mengenai sepak bola saja yang masuk ke dalamnya. Republika meletakkan narasumber yang berasal dari luar ranah sepak bola, yakni politisi PKS dan anggota DPR.

Dalam penggunaan diksi, Republika memilih untuk menggunakan kata “oknum” untuk merujuk pelaku pengeroyokan tersebut. Dengan menggunakan kata “oknum”, Republika mencoba untuk memuat wacana jika pelaku yang telah ditangkap oleh Polrestabes Bandung tersebut bukanlah bagian dari bobotoh. Republika juga menggunakan kata “biadab” untuk merujuk tindakan kerusuhan tersebut.

Pada hari yang sama, Republika juga menerbitkan berita dengan judul “The Jak: Kami tak Lakukan *Sweeping*”. Pada tataran skematik, berita tersebut dengan susunan skema, pertama, Sekretaris Umum the Jakmania, Dicky Soemarno yang menjelaskan jika kabar mengenai *sweeping* yang dilakukan The Jak adalah kabar hoaks. Kedua, Dicky mengungkapkan bahwa kedua pihak suporter dapat menjaga

barisan masing-masing. Ketiga, Ketua Umum Viking Persib Club, Heru Joko mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya Haringga Sirila.

Dengan tataran skema tersebut, Republika mencoba menyeimbangkan wacana yang mereka bangun. Sehingga, meski judul pemberitaan mengacu kepada The Jakmania sebagai objek pemberitaan, Republika mencoba memasukkan suporter Persib Bandung di akhir bagian berita tersebut.

Usaha untuk memasukan pernyataan dari pihak Persib Bandung di setiap pemberitaan nampaknya memang dilakukan oleh Republika. Pasalnya, hal ini juga terlihat pada pemberitaan yang terbit pada tanggal 28 September 2018 dengan judul “Lawan Mulai Ogah Duel di Bandung”. Pada tataran tematik, berita tersebut mengambil topik mengenai ketidaksediaan Madura United untuk berliga di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung sebelum kasus Haringga Sirila ini tuntas.

Dalam berita “Lawan Mulai Ogah Duel di Bandung” tersebut, alih-alih memuat lebih banyak pernyataan dari pihak Madura United, Republika justru memuat pernyataan dari pihak PT Persib Bandung Bermartabat lebih banyak; Manajer Persib Bandung, Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat, dan Kapten Persib Bandung.

Republika juga menggunakan diksi “oknum” untuk merujuk pelaku kerusuhan dalam berita ini. Penggunaan kata “biadab” juga kembali digunakan oleh Republika dalam pemberitaan ini.

“Umuh mengatakan, pihak kepolisian juga diharapkan dapat melihat permasalahan dengan bijak dan sesuai hukum. Menurut Umuh, para pelaku perbuatan biadab di GBLA akhir pecan lalu tidaklah mencerminkan sifat bobotoh secara keseluruhan.”(Republika, 28 September 2018)

Pada tanggal 27 September 2018, Republika menerbitkan berita dengan judul “Klub Minta Kepastian”. Usaha Republika untuk mengidentikkan diri dengan masyarakat penikmat sepak bola. Pasalnya, dalam berita ini, Republika menyoroti bagaimana klub-klub Liga 1 mengeluhkan keputusan PSSI yang menunda kompetisi tanpa batasan waktu.

Pengidentikkan diri oleh Republika tidak berhenti pada berita tersebut. Satu hari setelah berita “Klub Minta Kepastian” tersebut dimuat, Republika menerbitkan berita dengan judul “Liga 1 Dilanjutkan Awal Oktober”. Pada berita tersebut, Republika kembali menggunakan diksi “oknum” untuk merujuk pelaku kerusuhan yang menyebabkan meninggalnya Haringga Sirila. Selain “oknum”, Republika juga menggunakan

pilihan kata “masa moratorium” untuk merujuk masa senggang keding liga ditunda oleh PSSI.

Pada berita ini, Republika juga kembali memuat pernyataan dari banyak pihak yang terkait dalam kasus ini, seperti Wakil Ketua Umum PSSI, Sekretaris Jendral The Jakmania, dan Ketua Umum Viking Persib Club. Skema yang disusun oleh Republika dalam berita ini, sebagai berikut; pertama, Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono mengatakan jika Komdis PSSI akan mengeluarkan putusan sanksi pada akhir pekan ini sesuai hasil investigasi. Kedua, Sekretaris Jendral The Jakmania mengungkapkan jika tuntutan keadilan yang dilontarkan The Jakmania bukan hanya untuk kepentingan The Jak semata, melainkan agar kekerasan antarsuporter tidak terjadi lagi. Ketiga, Persib Bandung dan para Bobotoh menggelar acara doa bersama untuk almarhum Haringga Sirila.

Pada bagian akhir berita, Republika menggunakan nominalisasi “besarnya animo” untuk merujuk antusias masyarakat dalam acara doa bersama. Dengan menulis hal ini, Republika ingin mengungkapkan bahwa para bobotoh dan masyarakat Bandung juga memiliki respek kepada keluarga korban.

“Awalnya, doa bersama akan digelar di tempat parkir Stadion Sidosig. Namun, besarnya animo masyarakat membuat Viking harus memindahkan tempat ke Masjid Pusdai Tak disangka, seluruh ruangan masjid terisi penuh oleh jamaah yang ingin turut mendoakan Haringga.”(Republika, 28 September 2018)

Pada Minggu, 30 September 2018 Republika menerbitkan sebuah berita dengan judul “Putusan Komdis PSSI Segera Keluar”. Pada berita ini, Republika kembali mencoba menyeimbangkan pihak-pihak yang terlibat tanpa menyebutkan pihak suporter Persib Bandung yang bersalah. Republika memasukan gambar pada berita ini, yakni gambar Bobotoh di bagian atas dan gambar The Jakmania di bagian bawah.

Kemudian pada tataran semantik, Republika memilih untuk menulis “sebagai tuan rumah” untuk merujuk posisi Persib Bandung pada kasus meinggalnya Haringga Sirila ini. Dengan menuliskan latar Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada paragraf tersebut pula, semakin menguatkan bahwa posisi Persib Bandung di sana tidak lebih sebagai tuan rumah pertandingan.

“Hasil laporan dari tim investigasi ini nantinya diharapkan bisa menjawab penyebab insiden yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut. Hasil laporan dari tim investigasi ini, kata Umar, akan menjadi salah satu pokok bahasan dan bahan pertimbangan Komdis PSSI dalam menjatuhkan pada pihak terkait. Termasuk juga sanksi kepada klub Persib Bandung selaku tuan rumah.”(Republika, 30 September 2018)

Pada paragraf selanjutnya, Republika juga menyoroti adanya pihak lain yang mesti diberikan sanksi dari Komdis PSSI, yakni kesalahan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Dengan menuliskan hal tersebut, Republika menganggap bahwa ada faktor lain penyebab kerusuhan di GBLA itu terjadi, selain kesalahan dari oknum supporter Persib Bandung

Dalam pemilihan narasumber, Republika kembali memasukan pernyataan dari pihak Persib Bandung. Dalam berita ini, Republika memuat pernyataan Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez. Menurutnya, ia menyambut positif

adanya nota damai yang akan dilakukan oleh Bobotoh dengan The Jakmania.

3. Wacana Kompas: Berhati-hati dalam Menyebut Pihak yang Bersalah dan Fokus Mencari Solusi

3.1. Penundaan Liga oleh PSSI

Kompas mengeluarkan berita dengan judul “Darurat Sepak Bola Indonesia” pada tanggal 26 September 2018. Pada berita tersebut, pada tingkat tematik Kompas mengambil topik mengenai penghentian sementara Liga 1 oleh PSSI. Pada tataran skematik, skema yang digunakan oleh Kompas dalam pemberitaan ini, yakni pertama, Kompas memandang meninggalnya Haringga Sirila merupakan momentum yang harus digunakan oleh PSSI untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Kedua, Kompas memuat pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Presiden Joko Widodo untuk mengamini hal tersebut. Ketiga, Kompas memuat pernyataan Edy Rahmayadi yang menyatakan bahwa PSSI akan menghentikan sementara Liga 1 dan berjanji akan mencari solusi yang terbaik.

JAKARTA, KOMPAS – Tewasnya Haringga Sirila, suporter klub Persija Jakarta, Minggu (23/9/2018), menjadi momentum perbaikan sepak bola di Indonesia. Banyak pihak sepakat menghentikan

sementara kompetisi Liga 1 untuk berintrospeksi dan mencari solusi terbaik dari masalah berulangnya kekerasan antarsuporter. (Kompas, 26 September 2018)

Dari penggalan paragraf pembuka di atas, Kompas mencantumkan nominalisasi “banyak pihak” untuk menuliskan pihak-pihak yang dianggap menyepakati penghentian sementara kompetisi Liga 1. Selain itu dalam paragraf tersebut pula, Kompas mencantumkan pranggapan dengan menuliskan kalimat “Tewasnya Haringga Sirila, suporter klub Persija Jakarta, Minggu (23/9/2018), menjadi momentum perbaikan sepak bola di Indonesia”.

Selain itu, di bawah judul pemberitaan, Kompas menulis *lead* sebagai berikut:

Sepak bola Indonesia dianggap dalam situasi gawat darurat karena terus berjatuhannya korban jiwa. PSSI lantas memutuskan menghentikan sementara Go-Jek Liga 1 akibat kematian suporter. (Kompas, 26 September 2018)

Pada *lead* tersebut, Kompas seakan menyembunyikan agen atau pelaku utama dalam penulisan *lead* tersebut. Dalam kalimat pertama, Kompas menulis “Sepak bola Indonesia dianggap

dalam situasi gawat darurat”. Kompas menulis “dianggap” dan tidak mencantumkan pihak yang “mengganggu”. Dalam kalimat selanjutnya, Kompas menulis PSSI sebagai pihak yang lantas memutuskan, sehingga pihak yang disembunyikan oleh Kompas tersebut bisa jadi ialah masyarakat Indonesia atau klub atau para suporter, di luar PSSI. Selain itu, Kompas juga menggunakan diksi “gawat darurat” untuk menggambarkan kondisi sepak bola Indonesia.

Penghentian liga yang dilakukan oleh PSSI tidak dibarengi dengan adanya batas waktu penghentian. Sehingga semangat untuk memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia pada saat jeda kompetisi juga dibarengi dengan kekhawatiran akan dampak buruk dari keputusan itu. Pada tanggal 27 September 2018, Kompas juga menerbitkan berita dengan tajuk “Klub Butuh Kepastian Waktu Penghentian Liga 1”. Dalam pemberitaan tersebut, yang menarik adalah tataran skematik yang digunakan oleh Kompas. Terdapat beberapa skema menarik yang diterapkan oleh Kompas dalam pemberitaan ini. Seperti misalnya, pada paragraf awal, skema yang digunakan oleh Kompas, yakni, klub peserta kompetisi liga menghormati keputusan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1. Namun, pada kalimat selanjutnya, Kompas menuliskan kata “namun” di awal kalimat. Hal ini memperlihatkan penegasian terhadap

kalimat awal yang ditulis oleh Kompas di atas, bahwa para klub tersebut tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan PSSI tersebut.

Manajer klub Bhayangkara FC Sumardji sepakat liga harus dihentikan karena sepak bola Indonesia sedang berkabung. 'Namun, tanpa ada kepastian penghentian liga, kami resah dan merasa dirugikan,' kata Sumardji, kemarin di Jakarta. (Kompas, 27 September 2018)

Skema penegasian lain yang juga diterapkan oleh Kompas, yakni pada paragraf keempat. Pertama, Kompas menuliskan bahwasannya Manajer klub Bhayangkara FC sepakat untuk menghentikan sementara Liga 1 karena Indonesia sedang “berkabung”. Namun, pada kalimat selanjutnya, Kompas kembali menulis kata “namun” dalam kalimat aktif yang digunakan untuk menyatakan tanggapan narasumber.

Pada tataran sintaksis, dalam menghadirkan narasumber Jusuf Kalla, Kompas hanya menggunakan kalimat pasif dalam menyampaikan pendapatnya. Alih-alih menyelipkan kalimat aktif setelah penggunaan kalimat pasif, pendapat sebanyak tiga paragraf tersebut hanya dinarasikan dalam bentuk kalimat pasif.

Pada tanggal 28 September 2018, Kompas menerbitkan sebuah berita dengan judul “Terapkan Standar Keamanan”. Di bawah judul pemberitaan, Kompas menuliskan sebuah *lead*. Pada penulisan *lead* tersebut, Kompas membuka kalimat awal dengan menyantumkan bentuk non-agentif dengan menyembunyikan agen atau pelaku. Dalam kalimat, “PSSI didesak membuat standar pengelolaan penonton dan keamanan di stadion yang mengacu praktik-praktik sukses di negara lain”. Dengan menuliskan “didesak”, Kompas menunjukkan bahwa PSSI memang perlu membuat standar pengelolaan penonton karena ada yang “mendesak”. Tanpa memperlihatkan siapa yang “mendesak”.

Selain itu, Kompas juga menuliskan pranggapan pada salah satu paragraf di pemberitaan tersebut. Kompas menulis, “Tidak heran, kasus kericuhan, bentrokan, dan kekerasan antarsuporter terus terjadi di Tanah Air”. Penggunaan kata “tidak heran” dalam kalimat tersebut, seolah Kompas ingin mengatakan jika standar pengelolaan penonton dan keamanan di Indonesia memang ada yang perlu diperbaiki.

3.2. Meniru Langkah Inggris

Dari enam pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas pada kurun waktu 26 hingga 30 September 2018, sebanyak empat

pemberitaan terdapat perbandingan yang dilakukan oleh Kompas, antara sistem pengelolaan sepak bola Indonesia dengan sistem pengelolaan yang ada di Eropa maupun Liga Inggris. Seperti yang ditulis pada pemberitaan yang berjudul “Darurat Sepak Bola Indonesia”:

Terkait potensi sanksi, selain sanksi tegas seperti pengurangan poin, Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali juga menyarankan perlunya Indonesia meniru langkah Inggris dalam memberantas hooliganisme. Negeri kelahiran sepak bola itu pernah kewalahan dengan masalah tersebut pada era 1980-an.

(Kompas, 26 September 2018)

Melihat hal tersebut, Kompas seolah memandang sistem pengelolaan sepak bola di Indonesia merupakan hal yang kompleks sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang baik, dalam hal ini Kompas merujuk negara Inggris sebagai contoh. Tidak hanya berhenti di pemberitaan tanggal 26 September 2018 itu saja. Pada tanggal 28 September 2018, Kompas juga menyinggung mengenai sistem pengelolaan sepak bola Inggris dalam pemberitaan “Terapkan Standar Keamanan”.

Bahkan pada kolom Catatan Sepak Bola, tulisan dengan judul “Stop! Haringga Harus Jadi Korban Terakhir”, sang penulis Anton Sanjoyo juga meletakkan sub judul tersendiri

yakni “Berkaca ke Eropa”. Seperti yang ada pada berita “Darurat Sepak Bola Indonesia”, Anton Sanjoyo juga menyinggung mengenai pengelolaan basis pendukung sepak bola di Inggris Raya.

Selain itu, pada tanggal 28 September 2018, Kompas menerbitkan sebuah berita dengan judul “Seruan Damai untuk Seluruh Penjuru Negeri”. Berita tersebut dibuka dengan sebuah pranggapan yang tercantum dalam sebuah paragraf sebagai berikut:

“Duka dan doa damai untuk Haringga Sirla (22) terus mengalir dari Bandung Jawa Barat. Berharap, semuanya jadi energi menghapus dendam yang sering kali hanya menyisakan noda bagi laga sepak bola.”(Kompas, 28 September 2018)

Dengan menuliskan kata “yang sering kali”, Kompas menuliskan sebuah pranggapan yang merujuk kepada kebiasaan, dalam hal ini kebiasaan para supporter untuk menyimpan dendam. Paragraf tersebut juga dikuatkan dengan penulisan latar yaitu “Bandung Jawa Barat”. Dengan adanya penulisan latar tersebut, Kompas terlihat sedang berusaha untuk memberikan sebuah harapan baik dari adanya kasus ini.

Penulisan latar pada berita ini juga ditulis kembali dengan menyantumkan lokasi doa bersama Viking Persib Club, yakni di Masjid Pusat Dakwah Islam Bandung. Selain itu, pengambilan narasumber pada berita ini mengindikasikan bahwa Kompas memang sedang berusaha untuk menampilkan sisi positif dari pihak Persib Bandung untuk menggelar doa bersama, yang artinya perdamaian antarsuporter perlu untuk selalu digaungkan.

Tidak hanya itu, susunan skema berita pada berita “Seruan Damai untuk Seluru Penjuru Negeri” ini disusun dengan cukup menarik oleh Kompas, yang mana berita ini berisi mengenai doa bersama yang dilakukan oleh pihak Persib Bandung dan suporternya. Skema yang disusun oleh Kompas, yakni, pertama duka dan doa damai untuk Haringga terus mengalir dari Jawa Barat. Kedua, Viking Persib Club mengirim doa untuk Haringga di Masjid Pusat Dakwah Islam Bandung. Ketiga, Ustaz Hanan Ataki memimpin doa bersama tersebut dan mengungkapkan bahwasannya sepak bola harusnya mengajarkan persatuan dan kesatuan, bukan permusuhan. Pada bagian akhir berita, Kompas menarasikan bagaimana perasaan Agus Rachmat, salah seorang anggota Viking setelah mengikuti kegiatan doa bersama ini.

Cara pengambilan *angle* berita oleh Kompas tersebut menunjukkan bahwa Kompas lebih mendorong kepada pencarian

solusi atas ketegangan yang terjadi antara PSSI dengan klub dan para suporter. Meski demikian, dari pemberitaan yang diterbitkan, Kompas lebih mengidentikkan diri dengan klub dan suporter. Hal tersebut didukung dengan adanya tajuk rencana yang diterbitkan oleh Kompas. Dengan tajuk rencana tersebut, sama artinya dengan editorial Kompas telah memiliki kecenderungan sikap terkait ketegangan tersebut.

Tajuk Rencana tersebut berjudul “Menanti Ketegasan PSSI” yang terbit pada tanggal 26 September 2018. Dari judul, Kompas menempatkan PSSI sebagai objek pemberitaan yang tunggal, seolah peraturan yang diterapkan oleh PSSI untuk menunda kompetisi terasa tidak bijaksana. Satu hal yang menarik dari apa yang ditulis oleh Kompas dalam *lead* Tajuk Rencana tersebut. Kompas menulis “industri sepak bola kita” dalam kalimat *lead*. Kompas menulis sepak bola sebagai “industri”, dan Kompas juga menulis “kita” untuk melibatkan para pembaca ke dalam sikap editorial mereka tersebut.

Penggunaan kata “industri sepak bola” juga ada pada kolom Catatan Sepak Bola yang terbit pada tanggal 28 September 2018. Hal ini memperlihatkan seolah Kompas ingin menghadirkan wacana ekonomi dalam kasus ini. Bahwa apa yang terjadi dengan sepak bola akan selalu berkaitan dengan pengaruh ekonomi yang ada.

B. Praktik Kewacanaan

Tiga media cetak tersebut di atas menempatkan PSSI dan klub Liga 1 sebagai objek yang banyak dibicarakan. Meski demikian, masing-masing media memiliki penggambaran yang berbeda-beda mengenai PSSI dan klub Liga 1. Sehingga wacana dominan yang ada pada media-media tersebut yakni mengenai pembenahan dalam mengelola sistem persepakbolaan di Indonesia pasca kerusuhan antarsuporter yang melibatkan Haringga Sirila menjadi korban meninggal dunia.

Supriyadi dan Ida Zulaeha (2017) menulis, pada saat kita hendak memahami sistem ekonomi yang ada pada proses produksi dan distribusi produk media dalam wujud bahasa, sesungguhnya proses pemahaman yang kita lakukan telah masuk dalam wilayah ekonomi media. Pada tataran tersebut, teks media berupa peralihan dari struktur bahasa menjadi struktur ekonomi. Hal itu biasa dikemukakan dalam melihat teks media sebagai suatu sarana kepentingan ekonomi. Perhatian ekonomi media mengarah kepada bagaimana produksi dan pertukaran isi media berlangsung dalam situasi ekonomi tertentu. Dalam kaitan tersebut, kekuatan pemilik modal dan pembuat kebijakan media memiliki pengaruh langsung terhadap jalannya produksi dan distribusi bahasa media.

Menurut kaidah jurnalistik, bias pemberitaan kerap muncul karena dipicu adanya konflik kepentingan. Bias pemberitaan tersebut muncul dalam bentuk adanya berita yang memihak kelompok tertentu yang

sedang berkonflik (*imbalance*), melakukan stigmatisasi (*prejudice*), dan memperoleh keuntungan pribadi/kelompok atas pemberitaan yang dibuat. Adanya konflik kepentingan pemilik media tersebut berpengaruh kepada kebijakan redaksional dan dapat menghilangkan independensi para redaktur (Wilson dalam Putra dkk, 2016:217).

Kesetiaan kepada kebenaran merupakan pembeda antara wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Setiap orang boleh berbicara apa saja meskipun isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tetapi jurnalisme dan komunikasi bukanlah hal yang sama (Harsono, 2010:25).

Jawa Pos, Kompas, dan Republika berdiri sebagai industri media, di mana masing-masing masih mempertahankan institusi bisnis mereka. Media tersebut mempertahankan institusi bisnis mereka dengan cara mengikuti kemauan pasar, alih-alih dengan cara mengedepankan mutu jurnalisme yang selama ini digadang-gadang sebagaimana seharusnya. Hal ini terlihat dengan bagaimana masing-masing media tersebut menyorot kasus meninggalnya Haringga Sirila ini sehingga masing-masing media tersebut memiliki perspektif dan wacana yang berbeda-beda, pun dengan jumlah artikel yang mereka rilis; Jawa Pos merilis sembilan berita, Kompas enam berita, Republika sebanyak 13 berita.

Dalam mengangkat kasus ini, Jawa Pos lebih vokal menyoroti bagaimana kinerja PSSI selama ini yang dianggap oleh masyarakat perlu untuk dibenahi. Jawa Pos acapkali menuliskan judul maupun di tubuh berita dengan pernyataan yang memandang PSSI sebagai agen yang negatif. “Tertunda, Sulit Menjaga Performa” dan “Harapan Kepada Komdis PSSI Baru” cukup mengindikasikan bagaimana wacana negatif terhadap PSSI tergambar dalam pemberitaan Jawa Pos.

Selain menyoroti PSSI dengan begitu lantang, Jawa Pos juga kerap menyoroti bagaimana tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh para suporter di Indonesia, dalam hal ini yakni suporter Persib Bandung dan Persija Jakarta. Maka tak ayal jika dalam salah satu kolom opininya, Jawa Pos memuat tulisan dari Miftakhul F.S. yang dengan gamblang menuliskan “Dan atas apa yang terjadi di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Minggu siang itu (23/9): Bobotoh salah, Jakmania salah, dan kita semua juga salah.”

Selain itu, Jawa Pos dalam tema Seruan Perdamaian Antarsuporter juga menyoroti bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh para suporter ketika sedang mendukung klub kesayangannya di stadion. Salah satu berita yang mereka muat, yakni berjudul “Sepakat Hilangkan Nyanyian Dibunuh Saja”. Sorotan terhadap para suporter ini dilakukan oleh Jawa Pos tanpa ragu dan takut akan kehilangan pangsa pasarnya.

Narayana Mahendra Prastya (2016) dalam penelitiannya menuliskan wawancara dengan salah satu redaktur rubrik olahraga Jawa Pos, Kholili Indro. “Sejak dari awal kita mengajukan unsur-unsur pembinaan terhadap suporter dan ketidaksetujuan adanya sikap-sikap anarkis dalam sepak bola Indonesia. Di sini kita juga ingin mendidik bagaimana suporter bisa berperilaku lebih baik.” (Wawancara dengan Kholili Indro, redaktur rubrik olahraga Jawa Pos, 12 Februari 2007).

Dalam pemberitaannya terkait meninggalnya Haringga Sirila ini, alih-alih memberitakan banyak mengenai kerusakan Bobotoh dan The Jakmania, pada pemberitaan “Sepakat Hilangkan Nyanyian Dibunuh Saja” dan “Tertunda, Sulit Menjaga Performa”, Jawa Pos sering menyinggung mengenai pertandingan antara Arema dan Persebaya yang gagal digelar. Dengan adanya pemberitaan tersebut, hal itu mengindikasikan bagaimana keterkaitan erat antara Jawa Pos dengan Persebaya Surabaya.

Masuknya Persebaya Surabaya dalam beberapa pemberitaan Jawa Pos, memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara keduanya; Jawa Pos dan Persebaya Surabaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajar Junaedi dkk (2018), pada awal dekade 1980-an, dalam praktek jurnalisme olahraganya, Jawa Pos sering mengalokasikan pemberitaannya secara berlimpah tentang Persebaya dan Bonek. Padahal pada saat itu, prestasi Persebaya sedang terpuruk. Jawa Pos

justru memberikan porsi yang berlimpah untuk Persebaya. Persebaya diglorifikasikan oleh Jawa Pos dengan diberi julukan *Green Force*, dan fans Persebaya diberi julukan dengan nama Bonek sebagai bentuk glorifikasi.

Dalam hal ini, Persebaya memang terlihat untuk tetap mempertahankan pangsa pasar mereka, di tengah-tengah kasus meinggalnya Haringga Sirila ini. Hal ini seperti ungkapan salah satu redaktur pelaksana olahraga di Jawa Pos yang ditulis oleh Narayana Mahendra Prastya (2016) dalam penelitiannya. “Jawa Pos berposisi di Surabaya sehingga masalah berita-berita Persebaya terutama, mendapat porsi banyak. Artinya di sana ada unsur-unsur kedekatan dan unsure-unsur ketertarikan masyarakat untuk mengetahui Persebaya besar.” (Wawancara dengan Kholili Indro, redaktur rubrik olahraga Jawa Pos, 12 Februari 2007).

Tidak hanya di Jawa Pos, PSSI juga menjadi objek pemberitaan yang banyak digambarkan pula oleh Kompas. Dibandingkan dengan klub dan suporter, PSSI kerap diangkat oleh Kompas sebagai objek pemberitaan. Sedangkan klub dan suporter menjadi agen yang “disembunyikan” oleh Kompas. “Terapkan Standar Keamanan” cukup mengindikasikan hal tersebut.

Surat Kabar Harian Kompas ini masuk dalam salah satu bisnis media di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Elisabeth Rotua Simamora (2016) menulis, Kompas Gramedia Group ini merupakan

salah satu dari 12 media besar di Indonesia. Selain Kompas, Kompas Gramedia Group juga menerbitkan surat kabar Tribun yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Kontan, Warta Kota, dan Harian Surya.

Berbeda dengan Jawa Pos yang dengan gamblang menyebutkan PSSI sebagai objek pemberitaannya, Kompas cukup berhati-hati dengan penyebutan PSSI sebagai objek. Hal tersebut terlihat dengan bagaimana Kompas memilih narasumber di beberapa pemberitaannya. Kompas menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai narasumber alih-alih dari pernyataan pihak klub dan suporter.

Hadirnya beberapa tokoh nasional yang tidak berkaitan langsung dengan sepakbolaan tanah air memperlihatkan bagaimana keterkaitan dekat antara Kompas dengan pemerintah. Strategi dalam mewadahi berbagai kepentingan ini merupakan andalan Jacob Oetama untuk mempertahankan Kompas, sehingga Kompas mampu menjadi surat kabar yang terkemuka. Pengalaman pemberedelan tahun 1965 dan 1978 membuat Kompas untuk menerapkan prinsip hati-hati dalam menyiasati berbagai kondisi sehingga mereka mampu bertahan hidup hingga sekarang (Sokowati, 2017:431).

Mantan pemimpin redaksi harian Pedoman, Rosihan Anwar pernah menyebut jenis jurnalisme Kompas ini sebagai “jurnalisme kepiting”. “Jurnalisme kepiting” yang ia maksud adalah kepribadian Kompas yang bergerak ala kepiting, mencoba selangkah setapak demi setapak

untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan pers yang ada. Jika dirasa aman, kaki keping bisa maju beberapa langkah, jika kondisi tidak memungkinkan, maka kaki keping pun bisa mundur beberapa langkah. Karena kekepingannya atau kehati-hatiannya tersebut sampai hari ini Kompas bisa bertahan (Zulfiningrum, 2014:142).

Bahkan Ross Tapsell (2018) pernah menulis dalam bukunya, Kompas dipimpin oleh Jacob Oetama yang nyaris menjadi pemimpin redaksi sepanjang masa Orde Baru. Jacob mengingat: “Kebijakan Kompas adalah memberitakan sebanyak mungkin, tapi agar bisa memberitakan, kami harus menjadi bijaksana sekali, atau hati-hati, atau pengecut.”

Sikap hati-hati Kompas tersebut juga membuat Kompas tidak secara eksplisit menyebut salah satu dari pihak Persija Jakarta dan Persib Bandung sebagai pihak yang bersalah. Kompas cukup berhati-hati dalam menuliskan kasus kerusuhan tersebut, baik dari segi pemberitaan yang juga menyangkut dengan PSSI maupun sesama klub dan suporter. Hal ini dipengaruhi dengan lokasi Kompas yang berada di ibu kota Jakarta yang secara geografis berdekatan dengan Bandung. Kompas secara implisit ingin pangsa pasar mereka terjaga baik dari pembaca di Jakarta maupun yang berada di Bandung.

Jika Jawa Pos banyak membicarakan bagaimana kinerja PSSI selama ini dan perdamaian antarsuporter, Kompas menghadirkan sisi

yang lain, yakni bagaimana seharusnya sistem pengelolaan sepak bola tanah air bisa berkaca dan belajar dari pengelolaan sepak bola di Inggris dan Eropa. Wacana mengenai sistem pengelolaan yang baik seperti di Inggris dan Eropa tersebut merupakan alternatif yang diambil Kompas daripada harus membicarakan siapa yang bersalah dan benar secara eksplisit, meskipun mereka telah mengatakan bahwa PSSI harus mengambil sikap tegas dalam tajuk rencana mereka. Jumlah berita yang dirilis oleh Kompas pun terbilang sedikit, yakni enam pemberitaan dalam kurun waktu tiga hari.

Berbeda dengan Jawa Pos dan Kompas yang lebih banyak menyorot kepada wacana negatif PSSI, Republika berbicara hampir sebaliknya. Republika berusaha untuk selalu memasukan pernyataan dari pihak PT. Persib Bandung Bermartabat di setiap pemberitaannya. Dari delapan berita *straight news* yang diterbitkan, empat berita memuat pernyataan dari PT. Persib Bandung Bermartabat. Wacana yang digulirkan oleh Republika ini tidak terlepas dari bayang-bayang pemiliknya, yakni Erick Thohir.

Erick Thohir membeli Republika pada tahun 2001. Ia juga memiliki saham Visi News Asia milik Bakrie Group, yang kemudian membuat portofolio medianya terhubung dengan sebuah konglomerat digital. Republika merupakan perusahaan media menengah yang digabungkan dengan perusahaan media yang lebih besar, yakni Mahaka Group milik Erick Thohir, yang kepentingan bisnisnya

terhubung dengan konglomerat digital (Visi News Asia milik Bakrie) dan taipan lainnya (misalnya Tomy Winata) (Tapsell, 2018:106).

Keterkaitan tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan antara Republika dengan salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia, yakni Bakrie Group. Selain itu, Erick Thohir juga dikenal sebagai konglomerat yang kerap membeli sejumlah klub sepak bola dan basket. Terakhir, Erick Thohir tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Persib Bandung Bermartabat pada Liga 1 musim 2018. Hal ini semakin memungkinkan adanya bias pemberitaan di dalam media Republika dalam memberitakan kasus meninggalnya Haringga Sirila.

“Putusan Komdis PSSI Segera Keluar”, “Liga 1 Dilanjutkan Awal Oktober”, dan “The Jak: Kami tak Lakukan *Sweeping*”, dan “Liga 1 Dilanjutkan Awal Oktober” merupakan beberapa berita yang memuat adanya pernyataan dari pihak PT. Persib Bandung Bermartabat. Kemudian wacana yang digulirkan oleh Republika juga seperti bermain aman dengan menyebutkan bahwa kerusuhan yang terjadi dalam ranah sepak bola Indonesia ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Hal ini terlihat dengan bagaiman Republika banyak memuat berita wawancara khusus dengan banyak pihak, seperti wawancara dengan Menpora, klub Arema, dan KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia). Selain itu, Republika juga menerbitkan kolom Opini yang ditulis oleh Dudi Iskandar dengan judul “Komunikasi Sepak Bola”. Dalam kolom tersebut, Dudi selaku penulis

mengungkapkan jika kerusuhan yang terjadi dalam tubuh suporter sepak bola Indonesia ini tidak lepas dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, dalam hal ini yakni carut marutnya pihak penyelenggara kompetisi.

Republika sebagai surat kabar yang berdiri di bawah naungan Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Persib Bandung Bermartabat mencoba untuk mengaburkan fakta yang selama ini beredar di masyarakat bahwa yang melakukan aksi kerusuhan pada 23 September 2018 lalu adalah suporter Persib Bandung atau Bobotoh. Republika menyamakannya dengan berulang kali menggunakan kosakata “oknum” ketika merujuk kepada tersangka kerusuhan.

Selain itu, Republika juga berusaha untuk memberikan porsi yang cukup untuk Persija Jakarta dan tidak memberikan kesan negatif kepada mereka. Seperti misalnya pada pemberitaan “The Jak: Kami tak Lakukan *Sweeping*”, Republika kemudian memuat judul yang menjadikan The Jak sebagai agen yang positif. Dengan lokasi pusat yang berada di Jakarta, hal ini dilakukan Republika juga untuk menjaga pangsa pasar mereka.

Sebelum akhirnya pada 2001 dibeli oleh Erick Thohir, Republika merupakan media yang menggalang sejumlah intelektual dan jurnalis Islam liberal paling berpengaruh di negeri ini dalam menjalankan usahanya. Dalam memilih liputan peristiwa dan masalah yang diangkat, Republika tergolong sekuler. Meski demikian, harian ini

secara ideologis menginformasikan nilai-nilai Islami layaknya Kompas atau Suara Pembaruan dengan muatan Kristianinya (Hill, 2011:155).

David T. Hill (2011:155) juga mencatat, dana awal yang dimiliki oleh Republika merupakan dana yang berasal dari sejumlah pengusaha Muslim. Kemudian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) memegang 51 persen saham perusahaan ini.

Dengan latar belakang sejarah sebagai salah satu media Islam di Indonesia, hal ini memungkinkan pula adanya bias pemberitaan oleh Republika. Seperti yang ada pada pemberitaan dengan judul “Suporter Harus Dibina”, Republika menghadirkan narasumber yang berasal dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai Islam di Indonesia.

C. Praktik Sosiokultural

Persepakbolaan Indonesia kembali menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan masyarakat pasca terjadinya kasus kerusuhan yang melibatkan suporter Persija Jakarta dengan suporter Persib Bandung hingga memakan korban jiwa. Sorotan tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri saja, melainkan juga dari luar Indonesia. Pasalnya, kerusuhan yang terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia bukanlah hal yang baru. Kasus kerusuhan suporter yang melibatkan Haringga Sirila sebagai korban meninggal ini tercatat sebagai kasus ketujuh yang terjadi selama musim 2018. Maka dari itu, tak ayal jika sorotan dan kritik pembenahan terus ada dan berasal dari

internal maupun eksternal. Tak terkecuali dari tubuh induk sepak bola Indonesia itu sendiri, yakni PSSI.

Kerusuhan suporter sepak bola yang memakan korban jiwa tersebut, sebelumnya juga pernah terjadi pada era kepemimpinan sebelum Edy Rahmayadi menjabat sebagai ketua PSSI. *Republika* pada tanggal 28 September 2018 menuliskan, bahwa pada era kepemimpinan Nurdin Halid (2003-2011) terdapat 11 kasus, lalu pada kepemimpinan Djohar Arifin (2011-2015) terdapat 13 kasus, dan pada era La Nyalla Mattaliti (2015-2016) terdapat enam kasus. Kemudian jumlah ini naik pada kepemimpinan Edy Rahmayadi, yakni sebanyak 19 kasus.

Kondisi sepak bola di Indonesia dari tahun ke tahun tersebut mengindikasikan bagaimana kondisi persepakbolaan di tanah air; sepak bola yang hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok, wasit yang dinilai terlalu memihak salah satu klub pada saat pertandingan berlangsung. Bahkan, ketua PSSI, Edy Rahmayadi yang memegang dua jabatan strategis sekaligus; Ketua PSSI dan Gubernur Sumatera Utara. *Double* jabatan yang dilakukan oleh Edy Rahmayadi ini jelas menabrak peraturan yang ditetapkan oleh FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional), yang melarang adanya percampuran antara sepak bola dengan politik. Sehingga setiap pertandingan yang digelar di Indonesia dianggap hanya sebagai komoditas belaka, yang

melibatkan para supporter sebagai objek yang tidak dapat terpenuhi haknya untuk menonton sepak bola dengan nyaman dan aman.

Pada tahun 2016 Afdal Makkuraga Putra dkk, dalam penelitiannya menuliskan bagaimana kaitan erat antara sepak bola dengan segelintir orang tersebut. Juga terkait dengan konflik-konflik yang terjadi di dalam tubuh sepak bola Indonesia yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh para media demi mengeruk perhatian publik dan tentunya sesuai kepentingan masing-masing oligark. Afdal menulis mengenai bagaimana cara Kompas dan Bola, yang sama-sama berada di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), memilih untuk membelah keberpihakan mereka dalam pemberitaan kasus konflik PSSI dengan KPSI (Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia) agar tidak kehilangan pangsa pasar masing-masing. Karena bagaimanapun konflik yang terjadi, menjaga pangsa pasar juga menjadi sesuatu hal yang penting bagi media tersebut.

Kemudian kasus meninggalnya Haringga Sirila – yang merupakan kasus kerusuhan suporter pada era Edy Rahmayadi ini – juga kembali menyita perhatian publik dan media. Media yang dulu menganggap berita olahraga hanya sebatas hiburan, kini berbanding hampir sebaliknya. Pemberitaan mengenai olahraga, dalam hal ini sepak bola baru berani unjuk gigi pada era 1970-an. Setelah pada dekade sebelumnya hanya menjadi pemberitaan pada kategori “hiburan” karena dianggap tidak cukup penting dibandingkan dengan

pemberitaan kasus-kasus lain. *Desk* olahraga kerap dipandang sebelah mata dibanding dengan *desk* politik atau sosial.

Jika dulu berita olahraga sering diberi label sebagai “*toy journalism*”, saat ini permintaan pembaca mengenai berita-berita olahraga justru berkembang signifikan. Afdal Makkuraga Putra dkk (2016) mencatat, data yang dihimpun dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) pada 2010 menunjukkan, bahwa alasan kelima para pembaca surat kabar adalah karena ingin mengikuti berita sepak bola.

Ketika berita olahraga tidak lagi dijuluki sebagai *toy journalism*, berita-berita olahraga pada umumnya memiliki ruang tersendiri di media-media cetak Indonesia. Seperti Jawa Pos yang memiliki rubrik *Sportainment*, Kompas juga pernah memiliki tabloid BOLA – tapi kini sudah menutup edisi cetaknya – yang khusus untuk berita seputar olahraga.

Terlebih saat ini perkembangan zaman yang serba cepat dan serba *online* turut mempengaruhi pelebaran sayap yang dilakukan oleh raksasa media di Indonesia. Tidak terkecuali oleh Jawa Pos, Kompas, dan Republika. Ketiga media tersebut kini juga menambah jaringan pembaca melalui kanal *online*. Dengan adanya kanal *online* tersebut, para media memiliki cukup ruang yang lebar untuk menerbitkan

berita-berita olahraga sendiri. Olahraga umumnya sudah memiliki rubrik dan tempat tersendiri di kanal *online* tersebut.

Reformasi 1998 tidak banyak mengubah struktur pasar media yang telah terbentuk. Kebebasan pers yang terjadi pada era perpindahan atau transisi demokrasi hanya membuka katup botol sehingga membuat industrialisasi semakin berkembang lebih pesat. Persentuhan logika ekonomi dan politik dalam industri media berujung dengan konsentrasi kepemilikan. Istilah spasialisasi digunakan oleh Vincent Mosco (2009) untuk menjelaskan gerak konglomerasi media ini. Mosco menyebutkan, spasialisasi dalam konsentrasi kepemilikan media ini mengambil dua bentuk, horizontal dan vertikal (Utomo, 2013:1).

Wisnu Prasetya Utomo (2013) mencatat, adanya fenomena konglomerasi media ini membawa dampak yang berbahaya dan tidak dapat diremehkan. Pertama, arus informasi yang disajikan kepada publik menjadi monolitik. Dengan adanya kepemilikan media yang terpusat, media-media tersebut tidak memenuhi kaidah keragaman kepemilikan yang berakibat pada sedikitnya keberagaman isi. Kedua, agenda publik terabaikan. Sesuatu yang ditampilkan di dalam media disesuaikan dengan alur kepentingan pemilik modal. Ketiga, terjadi pergeseran peran warga negara semata-mata menjadi konsumen. Perannya sebagai konsumen, membuat masyarakat tidak mempunyai hak ikut serta dalam menentukan informasi yang diberitakan di media.

Keempat, menurunnya kualitas jurnalisme yang dipraktikkan media. Alokasi dana liputan banyak dialihkan untuk kepentingan strategi pemasaran karena kekuatan pasar mendominasi logika produksi. Kelima, konglomerasi menjadi pemilik media menjadi tiran dalam dirinya sendiri.

Para konglomerat media tersebut kemudian mengembangkan sayap bisnisnya ke luar ranah media. Sehingga bisnis-bisnis tersebut saling berkaitan dan menimbulkan kepentingan-kepentingan baru. Kemudian hal tersebut berimbas kepada pemberitaan yang hanya dipandang sebagai komoditas belaka. Para oligark media sangat mengetahui bagaimana dan di mana keuntungan media mereka berada dan berjalan. Terlebih dengan adanya media baru (*new media*) di kalangan masyarakat, kebenaran bukan lagi menjadi komoditas utama. Kebenaran akan dilihat dengan banyak sudut pandang dan kecepatan memaksa para media massa untuk mencari perhatian publik sebanyak-banyaknya.

Jawa Pos dengan keterkaitannya bersama klub Persebaya Surabaya dan Erick Thohir dengan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Persib Bandung Bermartabat turut melanggengkan bagaimana produksi berita tersebut dimuat. Mulai dari produksi teks hingga hal-hal di luar produksi teks. Pun dengan kaitan antara Mahaka Group dengan konglomerat terkemuka di Indonesia, yakni Bakrie Group.

Semakin banyak wacana yang masuk dalam pemroduksian berita pada masing-masing media tersebut.

Ketika kasus ini menyeruak ke publik, media dengan begitu cepat memberitakan kasus tersebut dengan banyak *angle* pemberitaan dan ditempatkan pada beberapa tempat yang strategis. Pada kasus meninggalnya Haringga Sirila ini, bahkan lebih dari satu tema yang berhasil diangkat oleh masing-masing media. Jawa Pos, Kompas, dan Republika memiliki tema yang berbeda-beda pula. Seperti yang ditulis oleh Zulaeha di atas, bahwa dalam unsur teks saja, para media tersebut sebenarnya sudah masuk ke ranah ekonomi politik media sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Dilihat dari praktik kewacanaan di atas, keterkaitan antara konglomerat Erick Thohir sebagai pemilik Republika dengan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Persib Bandung Bermartabat pada Liga 1 musim 2018 cukup memberikan bias pemberitaan dalam mengangkat kasus meninggalnya Haringga Sirila ini. Bias tersebut terlihat dengan bagaimana pelaku kerusuhan yang disebutnya sebagai “oknum” dan bukan bagian dari suporter Persib Bandung. Republika kemudian berusaha untuk memberikan wacana positif segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Persib Bandung, baik klub maupun suporter. Begitu juga dengan wacana yang digulirkan oleh Jawa Pos. Sebagai media yang dekat dengan klub sepak bola Persebaya, Jawa Pos kemudian menjadi penyuar para

klub Liga 1 dalam kasus ini. Pun Kompas dengan jurnalisme kehati-hatiannya yang kerap membandingkan sepak bola Indonesia dengan sepak bola Eropa sebagai solusi permasalahan sepak bola di Indonesia.

Rahmawati Zulfinigrum (2014) dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa Kelompok Kompas Gramedia (KKG) yang dipimpin oleh Jacob Oetama dan Jawa Pos Group yang dipimpin oleh Dahlan Iskan merupakan dua kelompok besar konglomerasi media cetak di Indonesia. Dengan adanya kepemilikan media yang besar tersebut, maka akan berimbas kepada berubahnya kebijakan dan tujuan media itu sendiri. Adanya konsentrasi media massa juga dapat mengakibatkan adanya homogenitas pemberitaan dan informasi akibat dari diverifikasi media. Masyarakat akan sulit mencari referensi lain dan sulit untuk melihat sisi lain dari suatu kasus yang diangkat oleh pemberitaan media massa karena homogenitas tersebut.

Ekonomi politik sepak bola menjadi lebih esensial sejak bersinggungan oleh elemen-elemen bisnis. Terdapat perdebatan yang muncul antara paradigma yang memahami sepak bola sebagai sebuah institusi bisnis dan paradigma sepak bola sebagai gerakan kultural dan aktivitas demokrasi. Perdebatan yang muncul itu diwakili oleh media yang melihat sepak bola sebagai komoditas atau barang jualan, suporter yang melihat sepak bola sebagai kegiatan kesenangan dan praktik identitas, dan juga pemerintah yang berusaha menciptakan

regulasi tentang sepak bola dan dijadikan ajang promosi gaya hidup sehat. Sehingga kemudian, sepak bola membutuhkan kebijakan politik yang lebih bagus yang dapat memastikan bahwa sepak bola bukan hanya sekadar barang jualan (Grant dalam Putra dkk, 2016:218).

Dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Jawa Pos, Kompas, dan Republika terkait kasus meninggalnya Haringga Sirila akibat kerusuhan antarsuporter sepak bola, memperlihatkan bagaimana jurnalisme olahraga di Indonesia bukan lagi hanya sekadar “*toy journalism*”. Bukan lagi sekadar pemberitaan yang *ecek-ecek*. Jawa Pos, Kompas, dan Republika menjadi contoh dari hal tersebut. Kompas dengan mengangkat kasus tersebut di tajuk rencana mereka, Jawa Pos yang sering menjadikannya *headline* pemberitaan, dan Republika yang sering memberitakan kasus tersebut. Meski demikian, campur tangan para oligark media kerap menimbulkan bias pemberitaan mereka. Terlebih jika para pemilik turut andil di belakang dan melibatkan rantai usaha mereka.